

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO ADHK (ATAS DASAR HARGA KONSTAN)
DI KABUPATEN BERAU**

Lisa Puspitasari

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Belanja Daerah Terhadap PDRB ADHK Di Kabupaten Berau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data sekunder.

Rumusan masalah adalah apakah Belanja Langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK, apakah Belanja Tidak Langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK dan apakah Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung secara simultan Berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK di kabupaten berau.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan, kuat dan positif antara Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap PDRB ADHK Di Kabupaten Berau yang di tunjukkan oleh koefisien determinasi sebesar 0,863 atau 86,3%. Hal ini berarti bahwa Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung mempengaruhi PDRB ADHK sebesar 86,3% sedangkan sisanya sebesar 13,7% di pengaruhi oleh factor-faktor lain. Dengan demikian bahwa hipotesis yang dikemukakan dapat diterima.

Keyword: Anggaran Belanja, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja penyelenggaraan

diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial,

fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Guna mengefektifkan dan mengoptimalkan alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi pada tahap awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relative besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan Wegner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner

menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*).

Analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2014- 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Persentase realisasi total belanja mengalami kenaikan pada periode 2014- 2018. Hal ini disebabkan kenaikan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung pada periode 2014- 2018 mengalami kenaikan. Komponen belanja pegawai merupakan komponen yang paling berkontribusi atas naiknya belanja tidak langsung. Realisasi belanja langsung meningkat karena kenaikan unsur belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.

Terjadinya kenaikan realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung menggambarkan bahwa kebutuhan pemerintah dalam pembangunan semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah

Volume 5, No.1, April 2021. Hal. 17

satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul “Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap PDRB ADHK”.

KAJIAN TEORI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonorni. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk mengukur tingkat perturnbuban ekonomi suatu daerah.

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung yaitu kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan [pemerintah daerah](#).

Menurut Badrudin (2012:97) Belanja Langsung digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas layanan publik berupa pembangunan prasarana dan sarana publik. Belanja langsung menjadi sorotan utama dalam analisis belanja pemerintah karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas layanan publik. Strategi belanja langsung oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kepentingan dan kebutuhan daerah.

2. Belanja Tidak Langsung

Menurut Baldric Siregar (2015:31) Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai program- program pembangunan sehingga anggarannya selalu dapat disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan. Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat dipakai sebagai indicator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu, Semakin besar dan semakin banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

b) Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang diolah dari pihak kedua. Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah sektor pariwisata yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Yang diperoleh dengan mencari di perpustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Belanja Langsung Tahun 2011-2018

No	Tahun	Tingkat Hunian Hotel
1	2011	864.219.332.000
2	2012	1.045.067.739.000
3	2013	1.071.533.211.000
4	2014	1.654.710.951.000
5	2015	1.875.736.614.000
6	2016	1.400.470.306.000
7	2017	1.007.792.367.000
8	2018	1.205.895.356.000

2. Belanja Tidak Langsung Pada Tahun 2011-2018

No	Tahun	Jumlah wisatawan
1	2011	542.613.735.000
2	2012	576.669.147.000
3	2013	651.347.577.000
4	2014	603.018.218.000
5	2015	863.262.570.000
6	2016	844.621.975.000
7	2017	885.749.297.000
8	2018	916.104.610.000

3. PDRB ADHK Pada Tahun 2011 – 2018

No	Tahun	Realisasi
1	2011	17.725.234.380.000
2	2012	20.467.252.870.000
3	2013	22.591.473.810.000
4	2014	24.449.675.470.000
5	2015	25.902.530.380.000
6	2016	25.474.874.700.000
7	2017	26.241.822.040.000
8	2018	26.766.141.900.000

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa alokasi belanja yang dianggarkan dalam tujuannya untuk meningkatkan PDRB ADHK yang ada di Kabupaten Berau ternyata pengaruh yang diberikan oleh kedua alokasi utama belanja daerah ini baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung secara bersama-sama memberikan pengaruh positif. Bahkan dari dua alokasi belanja utama pemerintah daerah ini ternyata alokasi

belanja tidak langsung yang justru memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Berau. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten/kota dikarenakan alokasi belanja langsung yang sebenarnya pengalokasiannya untuk pembangunan justru kurang memberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian, padahal melalui alokasi belanja langsung inilah pemerintah punya peran besar untuk meningkatkan perekonomian melalui pengalokasian anggaran pembangunan atau infrastruktur agar laju perekonomian dapat meningkat. Hal ini apabila ditarik kebelakang maka dapat dipahami bahwa sebagian besar daerah di kabupaten Berau masih bergantung pada anggaran perimbangan dari pemerintah pusat sehingga pengalokasian jumlah anggaran juga masih harus menerima banyak bimbingan dari pemerintah pusat dikarenakan masih digolongkan sebagai daerah dengan tingkat kemandirian rendah.

Kemandirian daerah yang berperan besar atas pengalokasian anggaran nantinya di daerah tentunya perlu untuk ditingkatkan dengan membangun

perekonomian daerah yang semakin berkembang serta konsisten membuka sumber-sumber perekonomian baru untuk dapat terus meningkatkan kemandirian. Dengan tingkat kemandirian yang semakin tinggi maka akan semakin membuat pemerintah di daerah punya kewenangan lebih besar dalam mengatur pengalokasian anggaran yang dimiliki ke sektor-sektor potensial yang dimiliki.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap PDRB ADHK dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mempunyai pengaruh yang positif terhadap PDRB ADHK Kabupaten Berau pada tahun 2011 sampai dengan 2018.
2. Nilai R^2 sebesar 0,863 menggambarkan bahwa variabel bebas (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) yang secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap

variabel terikat (PDRB ADHK) selama kurun waktu 2011 – 2018 sebesar 86,3% sedangkan sisanya sebesar 13,7% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini.

3. Berdasarkan uji F-statistik di dapati bahwa secara bersamaan variabel bebas (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terkait (PDRB ADHK) di Kabupaten Berau.
4. Berdasarkan uji t-statistik didapati bahwa variabel Belanja Langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Berau.
5. Berdasarkan uji t-statistik didapati bahwa variabel Belanja Tidak Langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Berau.

Saran

Meningkatkan efektivitas alokasi anggaran belanja langsung kepada sektor riil seperti infrastruktur jalan, irigasi, serta fasilitas publik lainnya yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah,

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. pemerintah

Kabupaten Berau masih perlu meningkatkan belanja langsung karena pembangunan di Kabupaten Berau masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*, penerbit UPP STIM YKPN
- Berutu, Reza Monanda. 2009. *Pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Dairi*. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Medan.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan

- | | | |
|--|-------------|---|
| Penerbit
Diponegoro. | Universitas | Ketiga. Jakarta: Rajawali
Pers. |
| Sugiyono. 2012. <i>Memahami
Penelitian Kuantitatif</i> . Bandung :
PT Alfabeta. | | Putra, Dwi Purnama. 2011.
<i>pengaruh belanja langsung
dan belanja tidak langsung
terhadap</i> |
| Sukirno 2011 : 423. <i>Makro
Ekonomi Teori Pengantar,
Edisi Ketiga</i> . Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada. | | <i>pertu
mbuhan ekonomi di
kabupaten Badung”</i>
Universitas Udayana.
Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana Bali. |
| Sukirno 2012:29 <i>Makroekonomi
Teori Pengantar</i> , Edisi | | |